



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 119 /PMK.07/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA DANA TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD.
- (2) Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 2

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disalurkan secara semesteran (enam bulanan), yaitu:
 - a. Semester Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan pada bulan Juni 2010; dan
 - b. Semester Kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan pada bulan November 2010.
- (3) Penyaluran Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penyaluran Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Alokasi prognosa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan pada bulan Oktober 2010.
- (6) Penyaluran Semester Kedua dapat dilaksanakan setelah Laporan Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Semester Pertama disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan melampirkan *Copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
- (7) Bagi Daerah yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 dan/atau kelengkapannya, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga harus melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009; dan atau
 - b. *Copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat; dan atau
 - c. *Copy* Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi atas penyetoran kembali sisa lebih Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Daftar perhitungan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD tidak termasuk untuk bulan ke-13.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membayarkan Dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru PNSD paling lambat, yaitu:
 - a. Semester Pertama pada bulan Juli 2010; dan
 - b. Semester Kedua pada bulan Desember 2010.
- (4) Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas persen) bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat, yaitu:
 - a. Semester Pertama pada akhir bulan Agustus 2010; dan
 - b. Semester Kedua pada akhir bulan Januari 2011.
- (2) Laporan Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi pembayaran dan kekurangan dana, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang di transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran Dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru PNSD;
 - b. Laporan Realisasi pembayaran dan kelebihan dana, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang di transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran Dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru PNSD;
 - c. Laporan Realisasi pembayaran dibuat secara Semester dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
 - d. Laporan Realisasi pembayaran yang disampaikan harus disertai dengan *Copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Dalam hal Laporan Realisasi Semester Pertama terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ataupun selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi prognosa definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Dalam hal Laporan Realisasi Semester Kedua terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ataupun selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi sementara Tahun Anggaran berikutnya setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

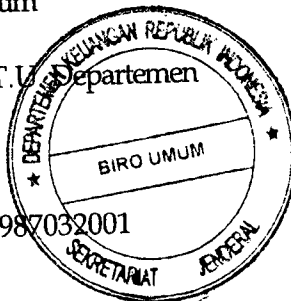
u.b.

Pj. Kepala Bagian T. U.



Adelina Sirait

NIP 196606031987032001





LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 119 /PMK.07/2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
SEMENTARA DANA TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN ALOKASI SEMENTARA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	356.700.000
2	Kab. Aceh Barat	6.626.625.000
3	Kab. Aceh Besar	11.672.700.000
4	Kab. Aceh Selatan	10.104.450.000
5	Kab. Aceh Singkil	3.911.400.000
6	Kab. Aceh Tengah	6.921.825.000
7	Kab. Aceh Tenggara	6.285.300.000
8	Kab. Aceh Timur	7.533.750.000
9	Kab. Aceh Utara	10.747.125.000
10	Kab. Bireun	12.958.050.000
11	Kab. Pidie	9.723.150.000
12	Kab. Simeulue	3.616.200.000
13	Kota Banda Aceh	6.269.925.000
14	Kota Sabang	2.426.175.000
15	Kota Langsa	4.772.400.000
16	Kota Lhokseumawe	4.735.500.000
17	Kab. Nagan Raya	6.734.250.000
18	Kab. Aceh Jaya	3.585.450.000
19	Kab. Aceh Barat Daya	4.926.150.000
20	Kab. Gayo Lues	4.034.400.000
21	Kab. Aceh Tamiang	7.358.475.000
22	Kab. Bener Meriah	4.467.975.000
23	Kota Subulussalam	3.121.125.000
24	Kab. Pidie Jaya	4.554.075.000
25	Provinsi Sumatera Utara	485.850.000
26	Kab. Asahan	10.122.900.000
27	Kab. Dairi	11.359.050.000
28	Kab. Deli Serdang	21.362.025.000
29	Kab. Karo	11.165.325.000
30	Kab. Labuhan Batu	7.057.125.000
31	Kab. Langkat	19.747.650.000
32	Kab. Mandailing Natal	8.656.125.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
33	Kab. Nias	12.444.525.000
34	Kab. Simalungun	22.281.450.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	8.653.050.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	7.035.600.000
37	Kab. Tapanuli Utara	8.868.300.000
38	Kab. Toba Samosir	7.401.525.000
39	Kota Binjai	5.190.600.000
40	Kota Medan	22.588.950.000
41	Kota Pematang Siantar	6.918.750.000
42	Kota Sibolga	3.114.975.000
43	Kota Tanjung Balai	4.326.525.000
44	Kota Tebing Tinggi	3.834.525.000
45	Kota Padang Sidempuan	7.275.450.000
46	Kab. Pakpak Bharat	2.610.675.000
47	Kab. Nias Selatan	5.891.700.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	6.014.700.000
49	Kab. Serdang Bedagai	11.429.775.000
50	Kab. Samosir	4.797.000.000
51	Kab. Batubara	8.084.175.000
52	Kab. Labuhan Batu Utara	6.519.000.000
53	Kab. Labuhan Batu Selatan	4.062.075.000
54	Kab. Padang Lawas Utara	4.123.575.000
55	Kab. Padang Lawas	5.599.575.000
56	Kab. Nias Utara	4.557.150.000
57	Kab. Nias Barat	1.765.050.000
58	Kota Gunung Sitoli	415.125.000
59	Provinsi Sumatera Barat	879.450.000
60	Kab. Limapuluh Kota	12.555.225.000
61	Kab. Agam	13.600.725.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	3.397.875.000
63	Kab. Padang Pariaman	12.582.900.000
64	Kab. Pasaman	8.028.825.000
65	Kab. Pesisir Selatan	15.704.025.000
66	Kab. Sijunjung	6.309.900.000
67	Kab. Solok	9.424.875.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH *
68	Kab. Tanah Datar	10.224.375.000
69	Kota Bukit Tinggi	3.391.725.000
70	Kota Padang Panjang	2.146.350.000
71	Kota Padang	18.339.300.000
72	Kota Payakumbuh	4.363.425.000
73	Kota Sawahlunto	2.426.175.000
74	Kota Solok	2.518.425.000
75	Kota Pariaman	4.274.250.000
76	Kab. Pasaman Barat	9.006.675.000
77	Kab. Dharmasraya	6.257.625.000
78	Kab. Solok Selatan	5.983.950.000
79	Provinsi Riau	353.625.000
80	Kab. Bengkalis	11.051.550.000
81	Kab. Indragiri Hilir	11.841.825.000
82	Kab. Indragiri Hulu	9.406.425.000
83	Kab. Kampar	12.060.150.000
84	Kab. Kuantan Singingi	8.954.400.000
85	Kab. Pelalawan	6.334.500.000
86	Kab. Rokan Hilir	5.642.625.000
87	Kab. Rokan Hulu	10.780.950.000
88	Kab. Siak	7.656.750.000
89	Kota Dumai	5.359.725.000
90	Kota Pekanbaru	13.914.375.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.431.075.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	70.725.000
93	Kab. Bintan	4.351.125.000
94	Kab. Natuna	4.381.875.000
95	Kab. Karimun	5.993.175.000
96	Kota Batam	7.484.550.000
97	Kota Tanjung Pinang	4.215.825.000
98	Kab. Lingga	4.126.650.000
99	Kab. Kepulauan Anambas	719.550.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
100	Provinsi Jambi	402.825.000
101	Kab. Batanghari	6.017.775.000
102	Kab. Bungo	6.297.600.000
103	Kab. Kerinci	6.872.625.000
104	Kab. Merangin	9.612.450.000
105	Kab. Muaro Jambi	7.816.650.000
106	Kab. Sarolangun	7.389.225.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.245.950.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.671.500.000
109	Kab. Tebo	5.722.575.000
110	Kota Jambi	9.384.900.000
111	Kota Sungai Penuh	4.301.925.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	639.600.000
113	Kab. Lahat	8.222.550.000
114	Kab. Musi Banyuasin	11.171.475.000
115	Kab. Musi Rawas	11.485.125.000
116	Kab. Muara Enim	12.678.225.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	14.944.500.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	8.367.075.000
119	Kota Palembang	24.098.775.000
120	Kota Pagar Alam	3.932.925.000
121	Kota Lubuk Linggau	4.670.925.000
122	Kota Prabumulih	4.800.075.000
123	Kab. Banyuasin	13.745.250.000
124	Kab. Ogan Ilir	8.376.300.000
125	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	10.215.150.000
126	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5.710.275.000
127	Kab. Empat Lawang	4.271.175.000
128	Provinsi Bangka Belitung	329.025.000
129	Kab. Bangka	6.303.750.000
130	Kab. Belitung	4.052.850.000
131	Kota Pangkal Pinang	4.277.325.000
132	Kab. Bangka Selatan	4.305.000.000
133	Kab. Bangka Tengah	4.274.250.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
134	Kab. Bangka Barat	4.154.325.000
135	Kab. Belitung Timur	4.498.725.000
136	Provinsi Bengkulu	202.950.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	6.322.200.000
138	Kab. Bengkulu Utara	6.866.475.000
139	Kab. Rejang Lebong	6.608.175.000
140	Kota Bengkulu	7.807.425.000
141	Kab. Kaur	4.308.075.000
142	Kab. Seluma	4.664.775.000
143	Kab. Mukomuko	5.067.600.000
144	Kab. Lebong	4.188.150.000
145	Kab. Kepahiang	4.698.600.000
146	Kab. Bengkulu Tengah	5.636.475.000
147	Provinsi Lampung	372.075.000
148	Kab. Lampung Barat	7.970.400.000
149	Kab. Lampung Selatan	13.028.775.000
150	Kab. Lampung Tengah	21.131.400.000
151	Kab. Lampung Utara	12.835.050.000
152	Kab. Lampung Timur	14.477.100.000
153	Kab. Tanggamus	23.354.625.000
154	Kab. Tulang Bawang	14.329.500.000
155	Kab. Way Kanan	9.483.300.000
156	Kota Bandar Lampung	13.370.100.000
157	Kota Metro	4.800.075.000
158	Kab. Pesawaran	8.419.350.000
159	Kab. Pringsewu	9.683.175.000
160	Kab. Tulang Bawang Barat	5.193.675.000
161	Kab. Mesuji	3.127.275.000
162	Provinsi DKI Jakarta	72.367.050.000
163	Provinsi Jawa Barat	5.716.425.000
164	Kab. Bandung	30.171.900.000
165	Kab. Bekasi	19.683.075.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
166	Kab. Bogor	25.322.625.000
167	Kab. Ciamis	25.230.375.000
168	Kab. Cianjur	19.009.650.000
169	Kab. Cirebon	22.158.450.000
170	Kab. Garut	31.872.375.000
171	Kab. Indramayu	20.338.050.000
172	Kab. Karawang	20.630.175.000
173	Kab. Kuningan	21.881.700.000
174	Kab. Majalengka	17.687.400.000
175	Kab. Purwakarta	9.464.850.000
176	Kab. Subang	20.547.150.000
177	Kab. Sukabumi	20.934.600.000
178	Kab. Sumedang	19.892.175.000
179	Kab. Tasikmalaya	21.343.575.000
180	Kota Bandung	31.986.150.000
181	Kota Bekasi	7.373.850.000
182	Kota Bogor	7.235.475.000
183	Kota Cirebon	5.931.675.000
184	Kota Depok	7.260.075.000
185	Kota Sukabumi	5.421.225.000
186	Kota Cimahi	7.401.525.000
187	Kota Tasikmalaya	10.664.100.000
188	Kota Banjar	3.447.075.000
189	Kab. Bandung Barat	14.753.850.000
190	Provinsi Banten	1.023.975.000
191	Kab. Lebak	18.591.450.000
192	Kab. Pandeglang	21.257.475.000
193	Kab. Serang	18.828.225.000
194	Kab. Tangerang	22.610.475.000
195	Kota Cilegon	6.463.650.000
196	Kota Tangerang	6.780.375.000
197	Kota Serang	8.016.525.000
198	Kota Tangerang Selatan	5.642.625.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
199	Provinsi Jawa Tengah	3.130.350.000
200	Kab. Banjarnegara	12.361.500.000
201	Kab. Banyumas	15.922.350.000
202	Kab. Batang	9.655.500.000
203	Kab. Blora	13.483.875.000
204	Kab. Boyolali	16.632.675.000
205	Kab. Brebes	19.855.275.000
206	Kab. Cilacap	21.011.475.000
207	Kab. Demak	11.771.100.000
208	Kab. Grobogan	15.064.425.000
209	Kab. Jepara	13.908.225.000
210	Kab. Karanganyar	14.941.425.000
211	Kab. Kebumen	21.266.700.000
212	Kab. Kendal	12.924.225.000
213	Kab. Klaten	16.442.025.000
214	Kab. Kudus	9.615.525.000
215	Kab. Magelang	17.668.950.000
216	Kab. Pati	13.200.975.000
217	Kab. Pekalongan	13.376.250.000
218	Kab. Pemasang	12.192.375.000
219	Kab. Purbalingga	12.724.350.000
220	Kab. Purworejo	13.093.350.000
221	Kab. Rembang	9.458.700.000
222	Kab. Semarang	12.954.975.000
223	Kab. Sragen	13.954.350.000
224	Kab. Sukoharjo	11.543.550.000
225	Kab. Tegal	17.628.975.000
226	Kab. Temanggung	10.018.350.000
227	Kab. Wonogiri	17.398.350.000
228	Kab. Wonosobo	10.205.925.000
229	Kota Magelang	4.169.700.000
230	Kota Pekalongan	3.062.700.000
231	Kota Salatiga	4.129.725.000
232	Kota Semarang	21.454.275.000
233	Kota Surakarta	9.698.550.000
234	Kota Tegal	4.578.675.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
235	Provinsi D.I. Yogyakarta	2.890.500.000
236	Kab. Bantul	14.676.975.000
237	Kab. Gunung Kidul	15.264.300.000
238	Kab. Kulon Progo	9.981.450.000
239	Kab. Sleman	15.587.175.000
240	Kota Yogyakarta	4.683.225.000
241	Provinsi Jawa Timur	4.065.150.000
242	Kab. Bangkalan	10.488.825.000
243	Kab. Banyuwangi	15.768.600.000
244	Kab. Blitar	20.165.850.000
245	Kab. Bojonegoro	15.233.550.000
246	Kab. Bondowoso	9.993.750.000
247	Kab. Gresik	9.892.275.000
248	Kab. Jember	25.122.750.000
249	Kab. Jombang	13.443.900.000
250	Kab. Kediri	16.844.850.000
251	Kab. Lamongan	8.164.125.000
252	Kab. Lumajang	12.502.950.000
253	Kab. Madiun	12.739.725.000
254	Kab. Magetan	16.282.125.000
255	Kab. Malang	23.966.550.000
256	Kab. Mojokerto	11.724.975.000
257	Kab. Nganjuk	14.240.325.000
258	Kab. Ngawi	14.311.050.000
259	Kab. Pacitan	13.453.125.000
260	Kab. Pamekasan	14.670.825.000
261	Kab. Pasuruan	11.605.050.000
262	Kab. Ponorogo	14.206.500.000
263	Kab. Probolinggo	11.672.700.000
264	Kab. Sampang	12.779.700.000
265	Kab. Sidoarjo	17.896.500.000
266	Kab. Situbondo	9.978.375.000
267	Kab. Sumenep	16.263.675.000
268	Kab. Trenggalek	14.028.150.000
269	Kab. Tuban	12.462.975.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
270	Kab. Tulungagung	23.197.800.000
271	Kota Blitar	4.431.075.000
272	Kota Kediri	6.079.275.000
273	Kota Madiun	5.848.650.000
274	Kota Malang	8.889.825.000
275	Kota Mojokerto	2.650.650.000
276	Kota Pasuruan	3.560.850.000
277	Kota Probolinggo	4.160.475.000
278	Kota Surabaya	15.913.125.000
279	Kota Batu	2.284.725.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	242.925.000
281	Kab. Bengkayang	7.293.900.000
282	Kab. Landak	9.200.400.000
283	Kab. Kapuas Hulu	8.425.500.000
284	Kab. Ketapang	9.003.600.000
285	Kab. Pontianak	7.014.075.000
286	Kab. Sambas	12.853.500.000
287	Kab. Sanggau	10.768.650.000
288	Kab. Sintang	9.277.275.000
289	Kota Pontianak	10.073.700.000
290	Kota Singkawang	6.208.425.000
291	Kab. Sekadau	5.098.350.000
292	Kab. Melawi	5.027.625.000
293	Kab. Kayong Utara	2.435.400.000
294	Kab. Kubu Raya	10.919.325.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	230.625.000
296	Kab. Barito Selatan	6.426.750.000
297	Kab. Barito Utara	5.873.250.000
298	Kab. Kapuas	10.507.275.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	5.928.600.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	8.237.925.000
301	Kota Palangkaraya	7.699.800.000
302	Kab. Barito Timur	6.537.450.000
303	Kab. Murung Raya	5.796.375.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
304	Kab. Pulang Pisau	6.602.025.000
305	Kab. Gunung Mas	6.027.000.000
306	Kab. Lamandau	4.255.800.000
307	Kab. Sukamara	2.813.625.000
308	Kab. Katingan	5.568.825.000
309	Kab. Seruyan	4.169.700.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	581.175.000
311	Kab. Banjar	11.054.625.000
312	Kab. Barito Kuala	5.765.625.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	7.629.075.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	7.819.725.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	7.167.825.000
316	Kab. Kotabaru	5.408.925.000
317	Kab. Tabalong	5.307.450.000
318	Kab. Tanah Laut	6.063.900.000
319	Kab. Tapin	6.199.200.000
320	Kota Banjarbaru	4.218.900.000
321	Kota Banjarmasin	8.831.400.000
322	Kab. Balangan	4.065.150.000
323	Kab. Tanah Bumbu	5.510.400.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	329.025.000
325	Kab. Berau	6.491.325.000
326	Kab. Bulungan	5.873.250.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	11.894.100.000
328	Kab. Kutai Barat	4.443.375.000
329	Kab. Kutai Timur	5.433.525.000
330	Kab. Malinau	3.265.650.000
331	Kab. Nunukan	3.803.775.000
332	Kab. Paser	5.731.800.000
333	Kota Balikpapan	7.792.050.000
334	Kota Bontang	2.380.050.000
335	Kota Samarinda	10.940.850.000
336	Kota Tarakan	4.717.050.000
337	Kab. Penajam Paser Utara	3.514.725.000
338	Kab. Tana Tidung	1.774.275.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
339	Provinsi Sulawesi Utara	242.925.000
340	Kab. Bolaang Mongondow	6.405.225.000
341	Kab. Minahasa	9.464.850.000
342	Kab. Sangihe	6.085.425.000
343	Kota Bitung	4.037.475.000
344	Kota Manado	10.919.325.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	4.818.525.000
346	Kab. Minahasa Selatan	7.109.400.000
347	Kota Tomohon	3.271.800.000
348	Kab. Minahasa Utara	4.098.975.000
349	Kota Kotamobagu	3.059.625.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Utara	4.102.050.000
351	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	4.022.100.000
352	Kab. Minahasa Tenggara	4.258.875.000
353	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.798.875.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.845.000.000
355	Provinsi Gorontalo	166.050.000
356	Kab. Boalemo	5.744.100.000
357	Kab. Gorontalo	8.161.050.000
358	Kota Gorontalo	6.186.900.000
359	Kab. Pohuwato	4.308.075.000
360	Kab. Bone Bolango	3.299.475.000
361	Kab. Gorontalo Utara	3.619.275.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	439.725.000
363	Kab. Banggai	8.391.675.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	5.362.800.000
365	Kab. Buol	5.790.225.000
366	Kab. Toli-Toli	5.350.500.000
367	Kab. Donggala	7.825.875.000
368	Kab. Morowali	8.161.050.000
369	Kab. Poso	6.900.300.000
370	Kota Palu	9.277.275.000
371	Kab. Parigi Moutong	7.232.400.000
372	Kab. Tojo Una Una	4.135.875.000
373	Kab. Sigi	7.607.550.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
374	Provinsi Sulawesi Selatan	1.230.000.000
375	Kab. Bantaeng	6.322.200.000
376	Kab. Barru	6.374.475.000
377	Kab. Bone	16.380.525.000
378	Kab. Bulukumba	9.492.525.000
379	Kab. Enrekang	6.263.775.000
380	Kab. Gowa	11.709.600.000
381	Kab. Jeneponto	8.004.225.000
382	Kab. Luwu	8.462.400.000
383	Kab. Luwu Utara	6.266.850.000
384	Kab. Maros	6.257.625.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	8.179.500.000
386	Kab. Pinrang	7.564.500.000
387	Kab. Kepulauan Selayar	5.808.675.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	6.411.375.000
389	Kab. Sinjai	7.862.775.000
390	Kab. Soppeng	8.809.875.000
391	Kab. Takalar	7.890.450.000
392	Kab. Tana Toraja	6.319.125.000
393	Kab. Wajo	8.330.175.000
394	Kota Pare-pare	6.005.475.000
395	Kota Makassar	16.894.050.000
396	Kota Palopo	4.218.900.000
397	Kab. Luwu Timur	4.428.000.000
398	Kab. Toraja Utara	4.901.550.000
399	Provinsi Sulawesi Barat	279.825.000
400	Kab. Majene	7.730.550.000
401	Kab. Mamuju	5.897.850.000
402	Kab. Polewali Mandar	8.932.875.000
403	Kab. Mamasa	4.498.725.000
404	Kab. Mamuju Utara	4.175.850.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	350.550.000
406	Kab. Buton	7.749.000.000
407	Kab. Konawe	8.277.900.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
408	Kab. Kolaka	7.782.825.000
409	Kab. Muna	10.710.225.000
410	Kota Kendari	8.317.875.000
411	Kota Baubau	5.196.750.000
412	Kab. Konawe Selatan	6.168.450.000
413	Kab. Bombana	4.200.450.000
414	Kab. Wakatobi	4.388.025.000
415	Kab. Kolaka Utara	3.530.100.000
416	Kab. Konawe Utara	3.766.875.000
417	Kab. Buton Utara	2.745.975.000
418	Provinsi Bali	1.208.475.000
419	Kab. Badung	10.178.250.000
420	Kab. Bangli	6.823.425.000
421	Kab. Buleleng	16.611.150.000
422	Kab. Gianyar	11.119.200.000
423	Kab. Jembrana	5.313.600.000
424	Kab. Karangasem	10.565.700.000
425	Kab. Klungkung	6.663.525.000
426	Kab. Tabanan	11.113.050.000
427	Kota Denpasar	8.849.850.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	341.325.000
429	Kab. Bima	10.082.925.000
430	Kab. Dompu	7.675.200.000
431	Kab. Lombok Barat	9.218.850.000
432	Kab. Lombok Tengah	14.065.050.000
433	Kab. Lombok Timur	19.799.925.000
434	Kab. Sumbawa	10.375.050.000
435	Kota Mataram	8.360.925.000
436	Kota Bima	6.027.000.000
437	Kab. Sumbawa Barat	3.865.275.000
438	Kab. Lombok Utara	2.475.375.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	264.450.000
440	Kab. Alor	7.017.150.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
441	Kab. Belu	10.814.775.000
442	Kab. Ende	8.606.925.000
443	Kab. Flores Timur	8.324.025.000
444	Kab. Kupang	9.197.325.000
445	Kab. Lembata	4.987.650.000
446	Kab. Manggarai	6.642.000.000
447	Kab. Ngada	5.249.025.000
448	Kab. Sikka	7.546.050.000
449	Kab. Sumba Barat	3.271.800.000
450	Kab. Sumba Timur	5.947.050.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	10.245.900.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	8.253.300.000
453	Kota Kupang	8.751.450.000
454	Kab. Rote Ndao	4.351.125.000
455	Kab. Manggarai Barat	5.974.725.000
456	Kab. Nagekeo	5.599.575.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	4.781.625.000
458	Kab. Sumba Tengah	3.191.850.000
459	Kab. Manggarai Timur	6.079.275.000
460	Kab. Sabu Raijua	1.522.125.000
461	Provinsi Maluku	547.350.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	7.638.300.000
463	Kab. Maluku Tengah	17.478.300.000
464	Kab. Maluku Tenggara	4.760.100.000
465	Kab. Buru	5.513.475.000
466	Kota Ambon	10.082.925.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	7.103.250.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	5.178.300.000
469	Kab. Kepulauan Aru	4.102.050.000
470	Kota Tual	2.204.775.000
471	Kab. Buru Selatan	2.389.275.000
472	Kab. Maluku Barat Daya	4.354.200.000
473	Provinsi Maluku Utara	246.000.000
474	Kab. Halmahera Tengah	3.256.425.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
475	Kab. Halmahera Barat	7.050.975.000
476	Kota Ternate	8.219.475.000
477	Kab. Halmahera Timur	2.456.925.000
478	Kota Tidore Kepulauan	7.336.950.000
479	Kab. Kepulauan Sula	4.292.700.000
480	Kab. Halmahera Selatan	7.081.725.000
481	Kab. Halmahera Utara	6.620.475.000
482	Kab. Pulau Morotai	1.331.475.000
483	Provinsi Papua	273.675.000
484	Kab. Biak Numfor	6.134.625.000
485	Kab. Jayapura	4.618.650.000
486	Kab. Jayawijaya	3.656.175.000
487	Kab. Merauke	6.239.175.000
488	Kab. Mimika	3.603.900.000
489	Kab. Nabire	4.956.900.000
490	Kab. Paniai	2.389.275.000
491	Kab. Puncak Jaya	1.362.225.000
492	Kab. Kepulauan Yapen	4.228.125.000
493	Kota Jayapura	6.171.525.000
494	Kab. Sarmi	1.291.500.000
495	Kab. Keerom	2.453.850.000
496	Kab. Yahukimo	2.260.125.000
497	Kab. Pegunungan Bintang	1.786.575.000
498	Kab. Tolikara	1.368.375.000
499	Kab. Boven Digoel	1.608.225.000
500	Kab. Mappi	2.601.450.000
501	Kab. Asmat	2.343.150.000
502	Kab. Waropen	1.497.525.000
503	Kab. Supiori	1.442.175.000
504	Kab. Mamberamo Raya	1.451.400.000
505	Kab. Mamberamo Tengah	848.700.000
506	Kab. Yalimo	1.011.675.000
507	Kab. Lanny Jaya	1.254.600.000
508	Kab. Nduga	1.039.350.000
509	Kab. Puncak	1.223.850.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
510	Kab. Dogiyai	1.792.725.000
511	Kab. Intan Jaya	405.900.000
512	Kab. Deiyai	1.442.175.000
513	Provinsi Papua Barat	129.150.000
514	Kab. Sorong	4.766.250.000
515	Kab. Manokwari	5.673.375.000
516	Kab. Fakfak	4.394.175.000
517	Kota Sorong	4.532.550.000
518	Kab. Sorong Selatan	2.819.775.000
519	Kab. Raja Ampat	1.903.425.000
520	Kab. Teluk Bintuni	1.888.050.000
521	Kab. Teluk Wondama	2.038.725.000
522	Kab. Kaimana	1.968.000.000
523	Kab. Tambrauw	738.000.000
524	Kab. Maybrat	1.162.350.000
TOTAL PROVINSI		100.389.525.000
TOTAL KABUPATEN / KOTA		4.112.563.425.000
TOTAL NASIONAL		4.212.952.950.000

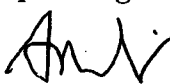
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

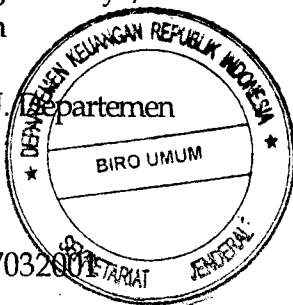
AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen


Adelina Sirait

NIP 196606031987032001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 119 /PMK.07/2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
SEMENTARA DANA TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KEPADA DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN
ANGGARAN 2010

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN 2010 DAN KELEBIHAN / KEKURANGAN DANA *)

GURU YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI	Jenjang Pendidikan			Jumlah
	TK & SD	SMP	SMA & SMK	
Guru PNS Daerah:				
a. PNS (orang)	x1	y1	z1	$\Sigma (x+y+z)1$
b. CPNS (orang)	x2	y2	z2	$\Sigma (x+y+z)2$
Jumlah Guru PNSD	Σx	Σy	Σz	$\Sigma x+y+z$
REALISASI PEMBAYARAN KEPADA:				
Jumlah Guru yang TERBAYAR (orang)	a	b	c	a+b+c
Jumlah Bulan Terbayar bulan bulan bulan	
Jumlah (Σ) Guru yang BELUM TERBAYAR (orang)	$\Sigma x - a$	$\Sigma y - b$	$\Sigma z - c$	$\Sigma (x+y+z) - (a+b+c)$
Jumlah Bulan Belum terbayar bulan bulan bulan	

Pagu Dana dalam PMK	Realisasi Pembayaran		Sisa Dana **)	Potongan PPh Pasal 21 ***)	Keterangan ****)
	s.d. Caturwulan sebelumnya	Caturwulan			
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (2+3)	(5)	(6)
Rp	Rp	Rp	Rp		

Keterangan :

*) — Pilih salah satu.

***) — Baik yang lebih bayar / kurang bayar (dana tersisa) harus mencantumkannya sebagai laporan.

****) — Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

*****) — Dapat ditambahkan keterangan penyebab kelebihan ataupun kekurangan dana dimaksud.

Tempat, 2010

Kepala Daerah

Ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Pi. Kepala Bagian T. U.
Adelina Sirait
NIP 196606031987082001